

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dan dijadikan sebagai landasan teori pada penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian terdahulu terdapat teori yang digunakan dan selanjutnya harus dikembangkan pada penelitian yang akan dilakukan agar penelitian ini terjamin kebaruan dan keaslian penelitian.

Pada penelitian terdahulu yang pertama ada penelitian dari Hartanti, Dwiymoko Pujiwidodo, dan Devi Angel Nikita Sianturi dengan judul “Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak” dengan tujuan untuk mencari tahu bagaimana PPN pengaruhnya terhadap Penerimaan secara keseluruhan. Dengan menggunakan metode kuantitatif ditambah dengan uji korelasi, koefisien determinasi serta uji t dan persamaan regresi, maka PPN sebagai variabel x dan Penerimaan Pajak keseluruhan sebagai variabel y, didapati hasil dalam rentang 2013 sampai dengan 2017 pada KPP pratama Jakarta-Duren Sawit bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dengan hasil uji determinasi sebesar 79,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Penelitian kedua ada penelitian dari Sinaga (2010) adalah analisis keterkaitan dari dua variabel yaitu, variabel dependen yang merupakan penerimaan pajak termasuk PPh, PPN, dan PBB kemudian tingkat Produk Domestik Bruto, nilai tukar rupiah, nilai impor, harga minyak mentah dunia, serta tingkat suku bunga dan

inflasi sebagai variabel independennya. Dengan menggunakan analisis regresi linier dengan dasar perhitungan metode *Ordinary Least Square*. Dari analisis tersebut ditunjukkan hasil bahwa Produk Domestik Bruto, nilai tukar rupiah, nilai impor, dan inflasi adalah komponen yang mempengaruhi total penerimaan pajak. Hasil lain juga didapat bahwa nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB, di sisi lain berpengaruh negatif dan signifikan terjadi antara inflasi dan penerimaan PPN.

Renata, dkk (2016), penerimaan PPN digunakan sebagai variabel dependen sedangkan inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP sebagai variabel independennya. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2014. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda didapat hasil yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan, sebaliknya pada variabel nilai tukar justru berdampak negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Damayanti, dkk (2016), dengan menggunakan variabel yang bersifat dependen yaitu tingkat inflasi, tingkat PDB, dan tarif pajak serta penerimaan di bidang perpajakan. Analisis regresi linier berganda adalah alat analisis yang digunakan oleh penulis. Hasilnya penulis mendapati bahwa penerimaan pajak khususnya di negara-negara asia dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat inflasi, tingkat PDB, dan tarif pajak.

2.2 Teori Pustaka

Setelah meninjau dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada, maka berikut akan dibahas teori-teori yang menjadi landasan pada penelitian ini.

2.2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

A. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah (*added value*) barang atau jasa yang terjadi dalam suatu proses transaksi. Tait (1988) berpendapat bahwa Nilai tambah adalah hal yang dihasilkan dalam proses produksi.... yang ditambahkan terhadap bahan material atau pembelian (termasuk tenaga kerja) sebelum produsen menjual hasil produksi nya atau jasa yang diberikan. Ebrill, *et al* (2001) menyatakan, “Pajak pertambahan nilai bukan sebagai pajak terhadap nilai tambah namun dikenakan terhadap suatu konsumsi. Selanjutnya Schenk dan Oldman (2001) menyatakan “dalam praktiknya, pajak atas konsumsi cenderung menjadi pajak atas transaksi....”.

Sedangkan menurut UU Nomor 42 tahun 2009, pajak pertambahan nilai memiliki definisi yaitu merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabeaan yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang diberikan terhadap barang setiap terjadi pertambahan nilai atau jasa yang berasal dari produsen ke konsumen.

B. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 tahun 2009, terdapat beragam nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, nilai tersebut adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor yang yang nantinya akan digunakan sebagai nilai dasar dalam perhitungan pajak.

- 1) Harga Jual merupakan jumlah uang yang mencakup semua biaya yang ditetapkan atau seharusnya diminta oleh penjual untuk penyerahan Barang

Kena Pajak. Harga ini tidak mencakup PPN yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan juga tidak mencakup diskon yang tercantum dalam Faktur Pajak.

- 2) Penggantian adalah jumlah uang yang mencakup semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha sebagai hasil dari penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Namun, penggantian ini tidak mencakup PPN yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Peratambahan Nilai. Selain itu, penggantian juga tidak mencakup nilai uang yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan oleh Penerima Jasa atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak, atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 3) Nilai Impor merujuk pada jumlah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk, termasuk pungutan berdasarkan peraturan yang mengatur kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak. Namun, dalam nilai ini tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Peratambahan Nilai.
- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai Lain, dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 terdapat penambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu nilai lain. Nilai lain adalah jumlah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPN untuk

komponen atau elemen tertentu dalam suatu transaksi. Ini mengacu pada nilai tambahan yang ditambahkan ke DPP yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai lain ini dapat berupa biaya pengiriman, biaya administrasi, atau komponen lain yang tidak termasuk dalam nilai barang atau jasa yang menjadi DPP utama.

C. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pertama-tama perhitungan PPN dilakukan dengan cara menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah dasar yang digunakan dalam menghitung pajak terutang yang nilainya dapat berupa nilai uang, harga jual BKP, jika menggunakan jasa menggunakan harga penggantian, jika melalui skema impor atau ekspor menggunakan nilai impor atau ekspor, dan nilai lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Setelah mendapatkan DPP barulah perhitungan PPN dilakukan dengan cara mengalikan DPP dengan tarif PPN yang berlaku.

PPN yang telah dihitung akan menjadi PPN terutang, PPN terutang dapat menjadi Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan. Dapat diklasifikasikan sebagai Pajak Keluaran ketika terjadi pungutan yang dipungut oleh PKP pada saat penjualan sedangkan pada sisi pembelian maka akan menjadi Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan pembelian.

2.2.2 Proses Bisnis Industri

Menurut Purwiyanto dan Tity (2002), penerimaan perpajakan ditentukan oleh faktor internal dan eksternal.

1) Faktor Internal, terdiri dari:

- a. Dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau objek pajak

Kondisi objek pajak ditentukan berdasarkan undang-undang. Untuk tarif tertentu kenaikan jumlah dan nilai objek berpengaruh positif terhadap kenaikan penerimaan pajaknya.

b. Tarif Pajak

Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap penerimaan perpajakan bervariasi tergantung pada kondisi tarif itu sendiri.

- 2) Selain dari faktor-faktor tersebut pada dasarnya penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu variabel perkembangan pada sisi makro ekonomi.

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, merupakan persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan, khususnya melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Selain meningkatkan jumlah pajak yang dibayar oleh penduduk yang telah membayar pajak, pertumbuhan ekonomi bisa menggeser posisi penduduk dari kelompok bukan pembayar pajak menjadi pembayar pajak, atau dari pembayar pajak dengan tarif tertentu ke tarif yang lebih tinggi.

b. Inflasi

Dalam periode waktu tertentu inflasi yang tidak terlalu tinggi berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan melalui naiknya nilai nominal dari pendapatan masyarakat dan konsumsi. Akan tetapi dalam jangka yang lebih panjang, tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat berpengaruh negatif

terhadap penerimaan perpajakan melalui pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi.

c. Nilai tukar rupiah

Nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh yang bervariasi terhadap penerimaan perpajakan. Untuk pajak yang terkait dengan valuta asing seperti, PPh, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, pajak ekspor, untuk jumlah penerimaan tertentu dalam valuta asing, maka semakin melemahnya nilai tukar rupiah akan meningkatkan penerimaan pajak yang bersangkutan atau sebaliknya. Di lain pihak, untuk pajak yang tidak terkait dengan luar negeri, pengaruh dari melemahnya nilai tukar rupiah akan menurunkan penerimaan pajak yang bersangkutan.

d. Harga minyak internasional

Di sisi penerimaan perpajakan, perubahan harga minyak internasional berpengaruh positif terhadap penerimaan terutama dari sektor pertambangan, khususnya PPh, PPN, dan PBB.

e. Produksi minyak mentah Indonesia

Faktor ini mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan dan sektor migas, khususnya PPh, PPN, dan PBB.

f. Tingkat suku bunga

Secara langsung, perubahan tingkat suku bunga akan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh dari bunga deposito. Namun tingginya tingkat bunga dapat memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi secara

keseluruhan dan akhirnya bisa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak jenis lain.

2.2.3 Produk Domestik Bruto (PDB)

Menurut BPS (2015), Produk Domestik Bruto (PDB) adalah peningkatan nilai tambah (*value added*) kotor atas seluruh barang dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik dalam negeri yang disebabkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu atau yang juga berarti bahwa jumlah nilai barang dan jasa akhir yang terbentuk oleh seluruh unit ekonomi. PDB dapat disajikan berdasarkan harga berlaku (*current year price*) ataupun harga konstan (*base year price*). Harga berlaku dihitung berdasarkan tingkat harga pada tahun yang bersangkutan, termasuk kenaikan harga-harga yang menjadi komponen perhitungan. Sedangkan harga konstan menggunakan patokan harga tahun dasar untuk menghitung nilai dari barang dan jasa tersebut.

Pada negara berkembang, seringkali pemerintah turut andil dalam perekonomian. Campur tangan pemerintah dilakukan dalam bentuk pengeluaran pemerintah yang mana akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi pada suatu negara tersebut, pengeluaran ini tidak hanya akan berdampak terhadap tersedianya berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan, namun juga sebagai salah satu variabel dari kenaikan permintaan agregat yang akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*, GDP).

Total output dari setiap sektor produksi akan dijumlahkan, sedangkan cara kedua yaitu menjumlahkan alokasi dari nilai bersih ekspor. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang akan sangat penting dalam proses

perencanaan. Misalnya, Tingkat pertumbuhan akan menjadi salah satu alat ukur makroekonomi dalam proses tahap pembuatan APBN tiap tahunnya. Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah dapat menentukan besaran penerimaan dari sektor perpajakan serta seberapa besar pengeluaran pemerintah, serta penetapan target dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Kenaikan PDB menjadi suatu alat ukur yang penting dalam analisis pembangunan ekonomi. Kenaikan PDB, menunjukkan tingkat aktivitas perekonomian yang mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode. Di mana PDB_t merupakan tingkat PDB pada tahun tertentu dan PDB_{t-1} adalah tingkat PDB yang terjadi pada tahun sebelumnya.

2.2.4 Teori Konsumsi

Menurut Keynes (1936), konsumsi adalah faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di mana tingkat pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga tingkat konsumsi. Namun, dinyatakan juga bahwa tingkat konsumsi tidak akan meningkat secara proporsional dengan peningkatan pendapatan.

2.2.5 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Menurut PER-12/PJ/2022, Klasifikasi Lapangan Usaha atau yang biasa disebut KLU adalah pengelompokan aktivitas maupun kegiatan ekonomi yang berisikan informasi aktivitas, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, ataupun pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh Wajib Pajak. KLU berisikan 5 (lima) digit kode angka dan 1 (satu) digit kode alfabet yang disebut kategori, kode ini guna untuk mengklasifikasi wajib pajak berdasarkan jenis badan usaha.

Klasifikasi Lapangan Usaha memiliki struktur dalam pemberian tiap kodenya, yakni golongan pokok, golongan sub golongan, dan kelompok kegiatan ekonomi. Ketentuan masing-masing KLU tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Sesuai dengan KEP-321/PJ/2012, struktur dan pengkategorian dalam pemberian kode KLU adalah sebagai berikut:

1. Kategori

Kategori menggambarkan garis pokok penggolongan dari kegiatan ekonomi yang dilambangkan dengan menggunakan satu digit alphabet. Dalam KLU, seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori.

2. Golongan Pokok

Menguraikan lebih rinci tiap-tiap kategori. Golongan pokok dilambangkan dengan dua digit angka. Setiap kategori diuraikan menurut sifat-sifat masing-masing golongan pokok.

3. Golongan

Menguraikan lebih lanjut golongan pokok. Dilambangkan dengan tiga digit angka yang dua digit pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan dan satu digit menunjukkan kegiatan ekonomi dari setiap golongan bersangkutan.

4. Subgolongan

Menguraikan lebih lanjut golongan. Dilambangkan dengan empat digit, yaitu tiga digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan, dan satu digit angka menunjukkan kegiatan ekonomi dari subgolongan bersangkutan.

5. Kelompok

Merupakan rincian lebih lanjut guna untuk memilah kegiatan ekonomi agar tergambar homogen.

2.2.6 Definisi Kilang Minyak

Kilang minyak atau sering disebut dengan istilah pabrik pengolahan minyak mentah merupakan fasilitas industri yang digunakan untuk mengolah minyak mentah menjadi produk yang siap untuk digunakan. Kilang minyak terdiri dari berbagai fasilitas yang kompleks dan memiliki peralatan yang canggih untuk melakukan proses pengolahan minyak mentah.

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pembangunan kilang minyak skala kecil di dalam negeri, kilang minyak skala kecil adalah sebuah kilang dengan kapasitas produksi paling banyak sejumlah 20.000 barel per harinya untuk menampung minyak bumi dan/atau kondensat. Sedangkan kondensat adalah hasil kondensasi dari produk mentah gas bumi yang didapatkan dari tekanan dan temperatur atmosfer fraksi pentana atau di atasnya.

Adapun tujuan pembangunan kilang minyak skala kecil ini antara lain untuk menyediakan ketahanan energi nasional, memberikan jaminan penyediaan BBM, melakukan kegiatan usaha dari hulu sampai hilir atas produk minyak dan gas bumi secara efisien, meminimalisir importasi komoditas BBM dan meningkatkan

perekonomian baik secara nasional maupun daerah dengan cara memaksimalkan manfaat dari produk minyak mentah serta kondensat asli dalam negeri.

Adapun keuntungan pembangunan kilang minyak skala kecil dibanding skala besar adalah dari sisi lamanya waktu yang dibutuhkan pada tahap perancangan dan tahap pembangunan, di mana waktu yang dibutuhkan adalah lebih sedikit, selain itu pada sisi pengawasan dan keamanan kerja akan jauh lebih mudah pada skala kecil dibandingkan skala besar, serta pada skala kecil juga membutuhkan energi serta lahan yang lebih sedikit dari pada kilang minyak skala besar. Di Indonesia sendiri dengan banyaknya sumur yang tersebar maka akan lebih efektif dan rendah biaya apabila banyak dibangun kilang minyak skala kecil pada lokasi sumur sumber minyak daripada harus membangun kilang minyak besar namun akan menimbulkan biaya yang besar disisi transportasi pengiriman minyak dari sumber menuju kilang minyak yang besar.

Maka dari itu dengan berdasarkan keuntungan-keuntungan tersebut maka demi menjamin tersedianya BBM agar terwujudnya ketahanan energi nasional produksi minyak dalam negeri, akan sangat tepat apabila opsi yang digunakan Beberapa perusahaan pengilangan minyak terkenal di dunia antara lain ExxonMobil, BP, Shell, dan Chevron. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kilang minyak yang sangat besar dan canggih untuk memproses minyak mentah menjadi produk yang siap untuk digunakan di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia perusahaan pengilangan minyak terbesar dipegang oleh Pertamina. Pertamina memiliki 6 (enam) kilang minyak yang tersebar di Indonesia. Kilang minyak sangat

penting bagi ekonomi dunia karena produk pengilangan minyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan dan mesin-mesin industri.

2.2.7 Produk Pengilangan Minyak

Produk pengilangan minyak terdiri dari bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, dan diesel, serta produk non-bahan bakar seperti aspal, pelumas, dan bahan kimia lainnya. Pengolahan minyak mentah dilakukan melalui beberapa tahap proses produksi yang sangat kompleks dan berbeda-beda tergantung pada jenis minyak yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Bensin adalah salah satu produk utama dari pengolahan minyak mentah. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan berbagai mesin lainnya. Selain yang sudah disebutkan diatas, LPG juga termasuk ke dalam produk yang dihasilkan oleh Industri Pengolahan Produk Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi. LPG adalah campuran gas hidrokarbon yang terdiri dari propane dan butane. LPG digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, pemanas rumah, dan aplikasi industri lainnya.

2.2.8 Proses Pengolahan Minyak

Dalam mendapatkan minyak yang siap untuk dijual ke konsumen perlu melalui beberapa proses produksi, di mana alur kerja produksi ini akan dimulai dari proses Ekstraksi yaitu proses mengambil minyak dari sumur minyak yang tersedia untuk kemudian diekstraksi lalu diangkut ke kilang minyak yang tersedia.

Selanjutnya minyak yang telah diangkut akan melalui proses Desalinasi pada lokasi kilang minyak yaitu proses yang akan memisahkan garam dari minyak mentah yang belum diolah tersebut, salah satu metode yang sering digunakan adalah menggunakan air laut untuk memprosesnya. Setelah garam berhasil dihilangkan maka proses akan dilanjutkan ke Pemisahan yaitu proses di mana minyak mentah yang telah didesilinsi akan dipisahkan menjadi fraksi yang berbeda sesuai dengan kelompok berat molekulnya.

Setelah minyak mentah dipisahkan menjadi fraksi maka proses selanjutnya adalah Pemurnian yaitu proses untuk menghilangkan senyawa- senyawa seperti belerang, oksigen, nitrogen yang merupakan senyawa yang tidak diinginkan untuk berada dalam kandungan minyak. Jika minyak telah steril dari senyawa senyawa tersebut maka akan dilakukan Konversi, yaitu tahapan mengubah minyak tersebut menjadi produk yang sudah memiliki nilai jual dengan nilai tambah dan kegunaannya sendiri, hasil pada proses ini antara lain bensin, solar, dan minyak pelumas.

Meskipun sudah dalam bentuk yang memiliki nilai jual, tetapi masih perlu melalui proses Blending, yaitu proses di mana terjadi kombinasi dengan senyawa tertentu untuk menciptakan campuran yang sesuai di mana persyaratan kualitas produk telah terpenuhi. Tahapan akhir adalah proses Pengemasan dan Distribusi di mana minyak yang sudah dalam bentuk produk akhir akan dikemas dan didistribusikan ke konsumen melalui sistem transportasi yang memadai, contohnya yaitu kapal tanker atau truk tangki.

Dalam memproses minyak mentah dari perut bumi sampai menjadi produk akhir wajib melalui tahapan proses di atas, dan pada setiap tahapan proses nya akan diperlukan teknologi yang canggih, tak hanya itu pengawasan dan pengendalian juga menjadi komponen yang penting dalam memastikan produk akhir memenuhi kualitas yang telah ditetapkan.

2.2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang memiliki peran sebagai alur logika sistematis dari tema yang akan ditulis nantinya, dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan pada penelitian., yang nantinya dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu menghasilkan suatu konsep yang saling terhubung sehingga dapat menggambarkan alur penelitian (Polancik, 2009). Penulis telah menyusun kerangka berpikir yang dituangkan ke dalam Lampiran I.